

## Raden Djoeardi Diusulkan Jadi Nama Jalan di Kota Bogor

**BOGOR (IM)** - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menerima usulan mengabadikan nama Wali Kota Bogor periode 1949-1954 R. Djoeardi menjadi salah satu nama jalan di kota hujan untuk mengenang sejumlah prestasinya di masa lalu.

Bima Arya di Kota Bogor, Rabu (6/9), menanggapi usulan dari cucu R. Djoeardi yakni Dani Djoeardi untuk mengabadikan nama kakeknya sebagai nama jalan dengan mempersilakan untuk mempersiapkan prosedur yang harus dipenuhi.

“Sudah disampaikan untuk mengirim surat resmi agar nanti dikaji dulu oleh perangkat daerah. Usulan jalan, di mana lokasinya, karena kita harus berproses dan beraudiensi dengan warga agar tidak ada dampak atau keberatan,” kata Bima.

Bima Arya menerangkan perlu ada narasi dari kiprah Bapak R. Djoeardi berkaitan dengan opsi jalan yang akan digunakan. Begitu pula usulan opsi jalan yang dipilih akan lebih bagus dan dikaitkan dengan historis yang menyangkut kepada kiprah R. Djoeardi.

Selanjutnya, Bima me-

nyarankan agar tidak memilih jalan yang panjang, karena semakin pendek jalan, maka persoalan semakin ringan, apalagi jika historisnya kuat sekali karena kalau alasan, argumen-tasi dan kuat atau setidaknya nilai historis akan menentukan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menerima kunjungan silaturahmi cucu dari Wali Kota Bogor periode 1949-1954, R. Djoeardi di Pasaban Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (4/9).

Kunjungan dilakukan dengan harapan nama R. Djoeardi dapat diabadikan sebagai salah satu nama jalan di Kota Bogor. Hal tersebut disampaikan Dani Djoeardi putra dari Djuwanda Djoeardi, putra keempat R. Djoeardi sebagai perwakilan keluarga. Kepada Bima Arya, Dani Djoeardi menyampaikan akan mengikuti prosedur yang ada.

Bima Arya mendapatkan cerita singkat R. Djoeardi yang ditulis putra keempatnya, Djuwanda Djoeardi.

Bahwa R. Djoeardi diangkat sebagai Wali Kota Bogor (1949-1954) dan menempati Kantor Wali Kota di Jalan Cikeumeuh 64, Bogor Barat. ● pp

SIAPKAN KAMPUS DAN IBU KOTA DI KABUPATEN BOGOR TIMUR

## Beben Siap Revisi Perda RTRW

**CIBINONG (IM)** - Selain Bogor Barat, Bogor Timur juga berpeluang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mekar dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bogor.

Kecamatan Jonggol pun digadang-gadang menjadi ibu kota Kabupaten Bogor Timur, di mana sudah tersedia lahan seluas 30 hektare untuk perkantoran Pemkab Bogor Timur.

“Kalau ibu kota Kabupaten Bogor Timur itu ada dua lahan tersedia dari swasta dengan luas masing-masing 30 hektare, lokasinya di Kecamatan Jonggol,” kata anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar, kemarin.

Tak hanya itu, anggota politisi Partai Gerindra ini pun menuturkan, bahwa sudah ada 3 universitas atau institut yang akan membangun kampusnya di Kabupaten Bogor Timur.

“IPB dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) akan membangun kampusnya di Kecamatan Jonggol dan Universitas Al-Azhar bakal membangun kampusnya Kecamatan Tanjungsari. Mudah-mudahan rencana

baik pembangunan kampus dan perkantoran ibu kota Kabupaten Bogor Timur ini segera terwujud dan saya siap membantunya melalui revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tutur Beben Suhendar.

Dengan terbangunnya dua universitas dan satu institut, mantan Camat Jonggol ini berharap bahwa Kabupaten Bogor Timur tidak hanya terkenal dengan kawasan industrinya, tetapi juga dikenal sebagai kota pendidikan.

“Dengan terbangunnya universitas maupun institut di Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Tanjungsari, masyarakat Kabupaten Bogor Timur nantinya bisa lebih mudah menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih mudah dalam menempuh cita-citanya,” harapnya.

Dari informasi yang di-himpun, dari total 7 kecamatan yang masuk dalam DOB Bogor Timur yaitu Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Cariu, Klapanunggal Jonggol, Cileungsi dan Gunung Putri. 3 Kecamatan di awal angka rata-rata lama sekolahnya sekitar 6 tahun. ● gio

## Banyak Bangunan di Kawasan Puncak Hanya Mengantongi Izin Prinsip

**CIBINONG (IM)** - Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mendukung pengendalian bangunan di kawasan Puncak. Dia menyebutkan, tak sedikit bangunan di kawasan Puncak hanya mengantongi izin prinsip.

Lantaran banyak bangunan di kawasan Puncak hanya mengantongi izin prinsip, ia bahkan lebih menyoroti bangunan yang mengantongi izin sistem Online Single Submission (OSS). Ia menegaskan, kalau bangunan liar sebenarnya Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, dan pemerintah pusat tinggal melakukan penertiban berupa pembongkaran.

“Dengan sistem OSS, maka dikantongilah izin prinsip namun ini IMB-nya belum lengkap karena harus ada beberapa rekomendasi. Hingga harus dimonitor site plan, apakah mereka memiliki kajian analisa dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas dan lainnya. Saya mendukung jika RTRW di kawasan Puncak karena

akibat alih fungsi lahan (bangunan di kawasan Puncak hanya mengantongi izin prinsip), kawasan wisata ini kini mulai menderita bencana alam kekeringan,” ujar Suryanto Putra, kemarin.

Ia menuturkan pengawasan dan penegakan aturan bangunan di Kawasan Puncak, harus melibatkan ban-

yang pihak, mulai dari Dinas Perumahan dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan (Distanhortubun) hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Pengendalian bangunan di Kawasan Puncak harus menjadi perhatian kita semua, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis harus melakukan kontrol dan pengawasan banyak pihak, termasuk masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor, Iwan Setiawan pun meminta para Camat, terutama Camat Cisarua dan UPT Tata Bangunan III melakukan pengawasan yang ketat, baik bangunan yang berada di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun bangunan komersial yang melanggar aturan seperti Koofisien Dasar Bangunan (KDB).

“Saya minta Camat dan UPT Tata Bangunan untuk memperketat pengawasan pembangunan di wilayahnya, laksanakan aturan, apalagi Kawasan Puncak memiliki Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur),” pinta Iwan Setiawan. ● gio

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



## PROGRAM PEREMAJAAN KEBUN TEH

Petani memangkas tanaman teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/9). Kementerian Pertanian tengah menggodok program peremajaan kebun teh untuk meningkatkan produktivitas teh di Indonesia, sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 produksi teh mencapai 136.800 ton atau turun 5,72 persen dari tahun sebelumnya sebesar 145.100 ton.

## APBD Kab. Bogor Defisit Rp200 Miliar, Sejumlah Proyek DPUPR Dibatalkan

Demi merasionalisasi anggaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Teuku Mulya secara tegas akan membatalkan sejumlah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di samping merasionalisasi, APBD berupa efisiensi dalam lelang pengadaan barang jasa dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**CIBINONG (IM)** -

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp200

miliar, dari harapan Rp9,8

triliun, dan anggaran yang tersedia hanya Rp9,6 triliun. Demi merasionalisasi anggaran, Kepala Badan Pengelo-

laan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Teuku Mulya secara tegas akan membatalkan sejumlah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Tentunya akan kami batalkan sejumlah program kerja SKPD agar tidak terjadi defisit di APBD 2023 kalau anggaran hibah anggaran untuk KPU Kabupaten Bogor itu kami tidak coret karena ada kepentingan Pemilu di Tahun 2024 mendatang,” kata Teuku Mulya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Teuku Mulya menuturkan selain membatalkan program kerja, upaya lain dalam merasionalisasi

APBD berupa efisiensi dalam lelang pengadaan barang jasa dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan efisiensi lelang pengadaan barang jasa dan peningkatan PAD, harapannya bisa membantu rasionalisasi APBD di tahun ini,” tuturnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, Andi Permana menerangkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sudah mengurangi defisit hingga Rp46 miliar.

“Kami sudah mencoret sejumlah program kerja hingga Rp 154 miliar, hingga kini tinggal Rp 46 miliar. Besok,

kami akan lanjutkan hingga tidak terjadi defisit lagi,” terang Andi Permana.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ini menjelaskan, bahwa ada beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dibatalkan atau dicoret, karena kalau dilaksanakan pun tidak bakal selesai di akhir Tahun 2023.

“Salah satu yang dicoret ialah proyek pembangunan Jalan Kemang-Rancabungur dengan nilai Rp 3 miliar, karena kalau tetap dipaksakan pun kami memprediksi akan meluncur ke awal Tahun Anggaran 2024,” jelas Andi Permana. ● gio

## Bupati Bogor Iwan Setiawan Ingin BUMD Jeli Gali Kekuatan Ekonomi



Bupati Bogor, Iwan Setiawan minta BUMD jadi lokomotif ekonomi di Bogor.

**BOGOR (IM)** - Bupati

Bogor, Iwan Setiawan meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk lebih optimal menggali potensi guna mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Hal itu ditegaskan Iwan

Setiawan saat membuka Workshop BUMD dalam rangka Optimalisasi Penerapan Tata Kelola BUMD yang Baik Menuju BUMD Sehat, yang berlangsung di Ole Suites Hotel & Cottage (Rafflesia Room), Darmawan Park, Babakan Madang, Selasa

(5/9).

Iwan Setiawan menegaskan, BUMD harus jadi lokomotif ekonomi Kabupaten Bogor, lebih aktif dalam menggali potensi secara maksimal guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tujuannya adalah mewujudkan

masyarakat Kabupaten Bogor sejahtera.

“Silakan persiapan diri, tingkatkan kinerja dengan profesional. Saya tidak ingin kerja yang biasa-biasa saja, lebih jeli gali potensi agar BUMD jadi lokomotif ekonomi Kabupaten Bogor,” ungkap Bupati Bogor.

Menurut Bupati Bogor, Workshop BUMD jadi sarana untuk memperkuat sinergi antara BUMD dengan Pemkab Bogor, juga menjadi momentum evaluasi dan sharing informasi.

Saya minta jangan ragu jika ada masalah, sampaikan sehingga kita bisa mencari solusi bareng-bareng. Kita evaluasi secara menyeluruh menuju BUMD sehat, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD Kabupaten Bogor,” tegas Bupati Bogor.

Kemudian, Plt. Asisten Ekbang, Didi Kurnia menerangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No-

mor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut dan diamanatkan agar seluruh BUMD dapat menerapkan tata kelola BUMD yang baik menuju BUMD yang sehat. Oleh karena itu perlu ada upaya salah satunya melalui pelatihan workshop BUMD ini.

“Ini kami lakukan untuk mengoptimalkan penerapan tata kelola BUMD lebih baik, agar BUMD sehat dan memiliki daya saing yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional. Serta mendorong pengelolaan BUMD lebih profesional, efisien dan efektif untuk meningkatkan kemandirian organisasi BUMD lingkup Kabupaten Bogor,” imbuh Didi.

Hadir dalam workshop optimalisasi penerapan tata kelola BUMD lebih baik menuju BUMD sehat yakni, Kepala BPKAD, seluruh dewan direksi dan pengawas BUMD lingkup Pemkab Bogor. ● gio

## Ribuan Kendaraan Plat Merah Milik Pemkab Bogor Diuji Emisi

**BOGOR (IM)** - Bu-

pati Bogor, Iwan Setiawan secara langsung memantau kegiatan uji emisi kendaraan bermotor tahap dua, khusus untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Menurutnya kendaraan milik pemerintah ini masih bisa kita kendalikan dan pemerintah harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.

Uji emisi tahap dua dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait di Stadion Pakansari, Cibinong, Rabu (6/9).

Sekitar 1.000 kendaraan yang diuji emisi, sementara yang tidak masuk antrean hari ini akan diuji di hari berikutnya karena kegiatan uji emisi akan terus berlanjut.

“Jadi hari ini kita memberikan contoh kepada masyarakat dengan menguji emisi kendaraan milik pemerintah, dan ternyata ada juga beberapa yang tidak lolos uji emisi,” ujar Iwan Setiawan.

akan didata dan harus segera diperbaiki, kemudian hari ini juga akan diuji kembali. Jadi yang tidak lolos uji emisi terindikasi masih menggunakan bahan bakar Pertalite yang oktannya rendah, seharusnya kendaraan plat merah wajib menggunakan Pertamina.

“Saya mengimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Bogor, agar seluruh kendaraan plat merah wajib menggunakan bahan bakar Pertamina,” tandas Iwan.

Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor, baik plat merah maupun plat hitam tidak akan bisa memperpanjang STNK, nomor kendaraan yang sudah lulus atau tidak akan terlihat melalui sistem aplikasi.

“Uji emisi tahap ke satu, kemarin kita coba untuk 100 kendaraan umum, dari 100 kendaraan terdapat 16 yang tidak lulus uji emisi. Rencana minggu depan akan ada uji emisi untuk kendaraan, khususnya di wilayah Jabodetabek ini sedang tinggi-tingginya, menggunakan bahan bakar yang oktannya tinggi adalah salah



Bupati Bogor, Iwan Setiawan memberikan contoh ke masyarakat uji emisi dengan cara ribuan kendaraan plat merah diuji emisi.

mengajak beberapa pihak yang berkompeten,” ungkap Bambang.

Ia mengimbau agar masyarakat dapat memelihara kendaraannya dengan baik, mempergunakan bahan bakar non-subsidi yang oktannya lebih tinggi agar pengapian bahan bakarnya lebih bagus.

“Tingkat pencemaran udara, khususnya di wilayah Jabodetabek ini sedang tinggi-tingginya, menggunakan bahan bakar yang oktannya tinggi adalah salah

satu langkah kecil yang bisa kita sumbangkan untuk mengurangi pencemaran udara di wilayah Jabodetabek,” imbaunya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bayu Ramawanto menuturkan, hari ini seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Bogor dapat perintah dari Bupati Bogor, agar kendaraan dinas mengikuti uji emisi.

“Alhamdulillah untuk Dis-kominfo kendaraan dinas

lulus uji emisi semua, dan ini buktinya bisa langsung beroperasi kembali seperti sedia kala,” ujar Bayu.

Bayu berharap, instansi terkait bisa melaksanakan uji emisi secara rutin dan cuma-cuma kepada masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal ini untuk memastikan kendaraan digunakan masyarakat itu telah lulus uji emisi dan aman terhadap lingkungan. ● gio